

Pimpinan MPR Berharap Konflik KAI-Peradi Segera Tuntas

WAKIL Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari berharap konflik antara Kongres Advokat Indonesia dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dapat segera diakhiri.

Wakil Ketua MPR menerima delegasi KAI di Ruang Rapat Pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPD, Jakarta, Senin.

Delegasi KAI yang datang ke gedung parlemen berasal dari DPP KAI maupun DPD KAI Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Riau. Delegasi menyampaikan bahwa perselisihan antar advokat, KAI dan Peradi selama setahun ini belum menemukan titik temu.

Hajriyanto merasa empati dan simpati. Pimpinan MPR ingin memberi kontribusi kepada KAI sesuai dengan wewenangnya. Adanya diskriminasi MA

diikuti oleh Hajriyanto Y Thohari ternyata sedemikian jauh dan mendasar sampai pada soal hidup.

"Ini masalah yang serius sebab setiap orang berhak mendapat pekerjaan yang layak," ujarnya.

Sesuai dengan kewenangannya maka ada tiga langkah yang akan dilakukan oleh Hajriyanto Y. Thohari sebagai pimpinan MPR. Pertama, akan menyampaikan masalah ini pada forum rapat pimpinan MPR. Kedua, sebagai lembaga negara, MPR bersama lembaga negara lainnya, seperti DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, KY, yang secara periodik mengadakan pertemuan. Lembaga negara itu sudah mengadakan pertemuan sebanyak 5 sampai 6 kali.

"Memang dalam pertemuan itu masing-masing lembaga negara berusaha untuk

tidak saling mengintervensi namun ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan di situ," ujarnya.

Hajriyanto Y Thohari akan menyampaikan masalah yang dialami KAI seperti apa yang dikatakan oleh pengurus KAI, sehingga MA mendapat informasi dari pihak lain.

"Banyak orang yang mengira konflik ini hanya sebatas kemelut antar organisasi advokat, padahal lebih dari itu," katanya.

Informasi yang akan disampaikan ini dirasa penting sehingga semua pihak merasa terpanggil untuk memecahkan masalah. Ketiga, akan dilakukan komunikasi dengan Komisi III dan melalui jalur partai politik asal masing-masing pimpinan. "Kita akan mengadakan komunikasi dengan Komisi III," ujarnya.

Kehadiran KAI ke MPR disambut

secara terbuka oleh Lukman Hakim Saifuddin. Dikatakan untuk memperjuangkan apa yang dialami oleh para advokat yang tergabung dalam KAI mesti dengan banyak cara.

"Jangan jadikan MPR sebagai satu-satunya lembaga untuk memecahkan masalah ini. Banyak pintu untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah ini. Disebut ada tiga hal yang bisa dilakukan, yakni pendekatan persuasif, politis dan hukum," katanya.

Lukman Hakim Saifuddin optimistis masalah ini bisa terpecahkan, dirinya akan melakukan komunikasi dengan Komisi III dan pemerintah. Pendekatan politis yang dilakukan tidak hanya secara formal namun juga bisa dilakukan bersama press dan gerakan civil society.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dirinya akan menjadi pembicara dalam foccus group discussion (FGD) di Komnas HAM. Dalam pertemuan itulah masalah KAI akan diangkat dalam acara itu. "Akan saya angkat dalam FGD di Komnas HAM," ujarnya. (ant)